



DAFTAR PUSTAKA

- Coryanata, Isma. (2007). *Akuntabilitas Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. SNA X. Universitas Hasannudin Makasaar. Juli 2007. ASSP-6.
- Creswell, John. W, (2014). *Research Design Quantitative, Qualitative and Mixed Method Approach*. 4nd ed. California: Sage Publication, Inc.
- Halim, Abdul. (2004). *Otonomi Daerah, Penganggaran Daerah, Dan Korupsi*. Seminar Nasional Dalam rangka Dies Natalis ke-44 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Handayani, Bestari Dwi. (2009). *Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kualitas APBD Kota Semarang*. Jurnal Dinamika Akuntansi. Vol. 1, No. 1: 31-40.
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Kusmandhani, Yogi. (2015). *Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pencairan Anggaran Belanja Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV*. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Lestari, Indriana Puji. (2007). *Efektivitas Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Meminimalisasi Kerugian Negara/Daerah*. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2001). *Pengawasan Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2004). *Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Layanan Publik*. Majalah Swara MEP, Vol. 3 No. 8 Maret, MEP UGM, Yogyakarta.
- Naharuddin. (2008). *Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Puhuwato 2004-2006*. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.



- Program Magister Akuntansi FEB UGM. (2015). *Panduan Pedoman Umum Penulisan Tesis*. Yogyakarta.
- Rahmawati, N.J. (2013). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Daerah terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat*. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Setyawati, Yuni. (2010). *Pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Pemoderasi*. Tesis. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Soewadji, Jusuf. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Sopannah. (2003). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi*. Cetakan 4. Bandung. CV Alfabeta.
- Wahyudi, Isa. (2010). *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Tesis. Universitas Widya Gama. Malang.
- Wiyana, Anim. (2009). *Pengaruh Latar Belakang Personal dan Budaya Politik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Yudoyono, Bambang. (2002). *Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah..*
- _____, 1998. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Negara Republik Indonesia.
- _____, 1999. *Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang*. Negara Republik Indonesia.



_____, 2001. *Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001. Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Negara Republik Indonesia.

_____, 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Negara Republik Indonesia.

_____, 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah*. Negara Republik Indonesia.

_____, 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*. Negara Republik Indonesia.

_____, 2014. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Negara Republik Indonesia.

_____, 2014. *Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat*. Negara Republik Indonesia.

_____, 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah*. Negara Republik Indonesia.

_____, 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*. Negara Republik Indonesia.

<http://www.kubarkab.go.id/>